

PENGARUH PERAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN BUMDES DI DESA PANGAUBAN KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT

Haura Nursalwa¹⁾, Dahly Sukmapryandhika²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran Kepala Desa terhadap efektivitas pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari fenomena stagnasi dan ketidakefektifan pengelolaan BUMDes Baitul Falah yang menunjukkan rendahnya keberlanjutan unit usaha dan minimnya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket kepada 75 responden yang terdiri dari perangkat desa, pengurus BUMDes, BPD, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa berada pada kategori “baik”, dan efektivitas pengembangan BUMDes berada pada kategori “cukup”. Uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa peran Kepala Desa berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengembangan BUMDes dengan kontribusi sebesar 30,9%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif dan strategis peran Kepala Desa, maka semakin tinggi pula efektivitas pengembangan BUMDes. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan kepala desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDes; Kepala Desa; Efektivitas; Pemerintahan Desa

Abstract

This study aims to determine the influence of the Village Head's role on the effectiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) development in Pangauban Village, Batujajar District, West Bandung Regency. The problem addressed in this research stems from the stagnation and ineffectiveness of BUMDes Baitul Falah, reflected in the lack of sustainable business units and minimal contribution to community welfare. This research uses a quantitative approach with an explanatory method. Data were collected through questionnaires distributed to 75 respondents, including village officials, BUMDes administrators, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and other stakeholders. The data were analyzed using simple linear regression with SPSS software. The findings show that the Village Head's role is categorized as “good,” while the effectiveness of BUMDes development is categorized as “fair.” Simple linear regression results indicate a significant influence

of the Village Head's role on BUMDes development effectiveness, with a contribution of 30.9%. This indicates that the more active and strategic the Village Head's role, the more effective the BUMDes development. This study recommends strengthening village leadership capacity and enhancing community participation in sustainable BUMDes management.

Keywords: BUMDes; Village Head; Effectiveness; Village Government

PENDAHULUAN

Pembangunan desa telah menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menekankan pentingnya penguatan kemandirian desa melalui otonomi pemerintahan dan pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi konkret dari amanat tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berperan sebagai lembaga ekonomi desa berbasis komunitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2015).

Secara nasional, BUMDes menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam hal jumlah. Hingga Oktober 2024, jumlah BUMDes yang tercatat mencapai lebih dari 61.000 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan kuantitatif ini tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan yang signifikan. Berdasarkan evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekitar 88% BUMDes yang diobservasi belum memiliki rencana bisnis yang matang, bahkan tidak menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal (BPKP, 2024). Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, terutama terkait aspek manajerial, perencanaan usaha, dan partisipasi masyarakat.

Kendala yang dialami BUMDes sebagian besar bersumber dari lemahnya kepemimpinan dan pembinaan di tingkat desa. Dalam konteks ini, Kepala Desa memiliki posisi yang sangat strategis. Kepala Desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pengarah, pembina, dan pengambil kebijakan utama dalam pengelolaan BUMDes. Kepemimpinan Kepala Desa yang bersifat proaktif, partisipatif, dan visioner

diyakini memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas lembaga ekonomi desa tersebut (Syafitiryani dan Rafika, 2023). Lebih jauh, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu juga menguatkan pentingnya peran Kepala Desa dalam mendukung keberhasilan BUMDes. Salmiah, Nanda, dan Adino (2021) menemukan bahwa fungsi koordinasi, evaluasi, dan fasilitasi yang dijalankan oleh Kepala Desa berperan penting dalam peningkatan kinerja lembaga usaha desa. Tanpa keterlibatan langsung Kepala Desa, pengelolaan BUMDes cenderung stagnan dan tidak mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Kondisi di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat menjadi ilustrasi konkret dari permasalahan tersebut. BUMDes Baitul Falah yang berdiri di desa ini telah menjalankan berbagai unit usaha seperti perdagangan sembako, pengelolaan sampah, pertanian cabai rawit, hingga peternakan ayam petelur. Namun beberapa program mengalami hambatan serius, seperti kegagalan panen, pemindahtanganan aset usaha ke pihak luar, dan tidak tepatnya penggunaan dana modal usaha, yang memicu ketidakpuasan dari masyarakat (Askaranews.id, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan pengembangan BUMDes sangat ditentukan oleh sejauh mana Kepala Desa memainkan perannya secara optimal dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan usaha desa.

Melalui studi ini, peneliti ingin mengkaji secara empiris sejauh mana peran Kepala Desa memengaruhi efektivitas pengembangan BUMDes, dengan mengambil studi kasus di Desa Pangauban. Fokus penelitian diarahkan pada tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes, (2) bagaimana tingkat efektivitas pengembangan BUMDes, dan (3) seberapa besar pengaruh peran Kepala Desa terhadap efektivitas pengembangan BUMDes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan ekonomi lokal, sekaligus menjadi

rujukan praktis dalam perumusan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan dependen secara objektif dan terukur (Duli, 2019; Sugeng, 2020). Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh aktor yang terlibat langsung dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Populasi terdiri dari 75 orang, yang meliputi Kepala Desa, perangkat desa, pengurus dan anggota BUMDes, pendamping desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.

Karena jumlah populasi relatif kecil (<100), teknik pengambilan sampel dilakukan secara sensus, yaitu melibatkan seluruh populasi sebagai responden penelitian (Sugiyono, 2013). Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang menyeluruh dan representatif dari seluruh elemen yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Instrumen utama yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket dengan skala Likert lima tingkat, serta dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa. Instrumen didukung oleh perangkat bantu seperti daftar pertanyaan, buku catatan, laptop, dan gawai.

PEMBAHASAN

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN BUMDES DI DESA PANGAUBAN

Peran Kepala Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan faktor sentral dalam keberlangsungan program ekonomi berbasis desa. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, peran Kepala Desa secara umum berada dalam kategori “Baik” dengan nilai rata-rata 3,57 dari skala lima. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki komitmen serta tanggung jawab dalam mendorong pengembangan BUMDes “Baitul Falah” sebagai instrumen ekonomi lokal.

Delapan indikator yang digunakan dalam mengukur peran kepala desa meliputi: keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan program, fasilitasi kebutuhan, pemberian arahan, dukungan promosi, motivasi kepada pengurus, pemantauan kinerja, serta kerja sama dengan lembaga desa lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa peran kepala desa paling menonjol adalah pada indikator X8 yaitu “kerja sama dengan lembaga desa” (3,88), yang menandakan bahwa kepala desa mampu membangun koordinasi dengan unsur-unsur kelembagaan lainnya, seperti BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna.

Indikator lain yang menunjukkan hasil baik adalah X6 “memberikan motivasi kepada pengurus BUMDes” (3,79), X5 “mendukung promosi usaha BUMDes” (3,67), dan X4 “memberikan arahan dalam pengembangan unit usaha” (3,63). Hasil ini mengindikasikan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai motivator dan pembimbing yang mengarahkan pengurus dalam menjalankan fungsi-fungsi bisnis.

Namun, terdapat indikator yang memperoleh skor lebih rendah dan masuk kategori “Cukup”, yakni X2 “keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program” (2,92) dan X7 “pemantauan kinerja pengurus” (3,39). Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pada tataran operasional, kepala desa belum terlalu intensif dalam mengawasi dan terlibat secara teknis dalam implementasi program-program BUMDes. Peran kepala desa cenderung lebih menonjol pada tahap konseptual dan kebijakan, dibandingkan pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.

Kesenjangan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pemerintahan desa yang masih terbatas dari segi waktu, sumber daya, dan kapasitas teknis. Kepala desa, dalam banyak kasus, memiliki tugas administratif yang padat sehingga keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha desa kerap terdelegasi pada pengurus BUMDes. Namun, delegasi ini menjadi kurang efektif bila tidak disertai dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat.

Dengan demikian, peran kepala desa secara umum sudah baik dalam hal dukungan kebijakan dan sinergi kelembagaan. Akan tetapi, agar pengaruhnya terhadap efektivitas BUMDes lebih optimal, perlu peningkatan

pada aspek pelaksanaan langsung dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kinerja unit-unit usaha yang dijalankan.

Tabel 1. Rata-rata Skor Peran Kepala Desa (Variabel X)

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
X1	Kepala desa berperan aktif dalam merencanakan pengembangan BUMDes.	3,71	Baik
X2	Kepala desa terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program BUMDes.	2,92	Cukup
X3	Kepala desa memfasilitasi kebutuhan pengurus BUMDes.	3,59	Baik
X4	Kepala desa memberikan arahan dalam pengembangan unit usaha BUMDes.	3,63	Baik
X5	Kepala desa mendukung promosi usaha BUMDes.	3,67	Baik
X6	Kepala desa memberikan motivasi kepada pengurus BUMDes.	3,79	Baik
X7	Kepala desa memantau kinerja pengurus BUMDes.	3,39	Cukup
X8	Kepala desa bekerja sama dengan lembaga desa lain dalam mendukung BUMDes	3,88	Baik
Rata-rata keseluruhan variabel X		3,57	Baik

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Hasil uji regresi sederhana memperkuat temuan ini, di mana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), yang berarti peran Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengembangan BUMDes. Nilai koefisien regresi sebesar 0,535 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin pada peran Kepala Desa akan diikuti peningkatan efektivitas pengembangan BUMDes sebesar 0,535 poin. Dengan kata lain, semakin aktif dan strategis peran Kepala Desa dijalankan, maka semakin besar pula peluang BUMDes untuk berkembang secara efektif dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN BUMDES

Pengembangan BUMDes Baitul Falah di Desa Pangauban diukur melalui delapan indikator yang merepresentasikan dimensi efektivitas seperti produktivitas usaha, pencapaian tujuan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi usaha, pengelolaan keuangan, hingga kepuasan masyarakat desa. Rata-rata nilai keseluruhan dari variabel Y ini berada pada angka 3,11 yang masuk kategori “Cukup”.

Beberapa indikator yang memiliki nilai cukup tinggi adalah Y7 “hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat” (3,48) dan Y5 “BUMDes memiliki strategi pengembangan usaha” (3,45). Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian hasil dari usaha BUMDes telah dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung dalam bentuk layanan maupun tidak langsung melalui pendapatan desa atau kegiatan sosial. Strategi pengembangan usaha yang dirumuskan juga mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya arah bisnis yang berkelanjutan.

Namun, indikator lain menunjukkan nilai yang masih rendah. Y2 “BUMDes mampu menjangkau kebutuhan ekonomi masyarakat” memperoleh nilai 2,71, dan Y3 “kontribusi terhadap PADes” memperoleh nilai 2,87. Ini menandakan bahwa BUMDes belum mampu menjadi lembaga yang secara nyata memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, baik dalam hal layanan, produk, maupun harga yang kompetitif. Dalam konteks ini, BUMDes belum berperan sebagai penyeimbang pasar atau pelengkap ekonomi desa secara utuh.

Selanjutnya, indikator Y4 “pelayanan kepada masyarakat” (2,96) dan Y8 “evaluasi terhadap kegiatan dilakukan secara berkala” (3,05) menunjukkan bahwa sistem pelayanan dan evaluasi BUMDes belum berjalan maksimal. Pelayanan yang kurang prima dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, atau lemahnya sistem manajemen. Sementara itu, minimnya evaluasi akan berdampak pada lemahnya akuntabilitas dan kontrol terhadap kinerja usaha.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengembangkan BUMDes, efektivitasnya masih berada pada tingkat sedang. Keterbatasan modal, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya inovasi, dan lemahnya sistem manajemen menjadi faktor penghambat utama. Situasi ini juga menggambarkan bahwa keberadaan BUMDes masih dalam tahap pembelajaran dan perlu didorong ke arah yang lebih profesional dan adaptif terhadap pasar.

Tabel 2. Rata-rata Skor Efektivitas Pengembangan BUMDes
(Variabel Y)

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
Y1	Unit usaha BUMDes berjalan sesuai rencana.	3,05	Cukup
Y2	BUMDes mampu menjangkau kebutuhan ekonomi masyarakat desa.	2,71	Cukup
Y3	BUMDes memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli desa.	2,87	Baik
Y4	Pelayanan BUMDes kepada masyarakat berjalan dengan baik.	2,96	Cukup
Y5	BUMDes memiliki strategi pengembangan usaha.	3,45	Baik
Y6	Pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan secara tertib.	3,33	Cukup
Y7	Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.	3,48	Baik
Y8	Evaluasi terhadap kegiatan BUMDes dilakukan secara berkala.	3,05	Cukup
Rata-rata keseluruhan variabel Y		3,11	Cukup

Sumber: Olahan Peneliti 2025

HUBUNGAN ANTARA PERAN KEPALA DESA DAN EFEKTIVITAS BUMDES

Untuk mengetahui hubungan antara peran kepala desa (variabel X) dengan efektivitas pengembangan BUMDes (variabel Y), dilakukan uji regresi linear sederhana. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel, dengan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05), dan nilai koefisien regresi sebesar 0,535. Artinya, setiap peningkatan satu unit pada peran kepala desa akan meningkatkan efektivitas pengembangan BUMDes sebesar 0,535 unit.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,296 menunjukkan bahwa 29,6% variasi efektivitas pengembangan BUMDes dapat dijelaskan oleh peran kepala desa, sementara sisanya (70,4%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Ini menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki peran signifikan, efektivitas BUMDes juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kapasitas pengurus, partisipasi warga, strategi usaha, serta kebijakan dari pemerintah daerah.

Peran kepala desa dalam hal ini lebih banyak memengaruhi aspek konseptual dan kebijakan, seperti perencanaan usaha, pembentukan kelembagaan, pengalokasian anggaran desa, serta kerja sama lintas sektor. Sementara itu, efektivitas BUMDes menuntut keterpaduan antara

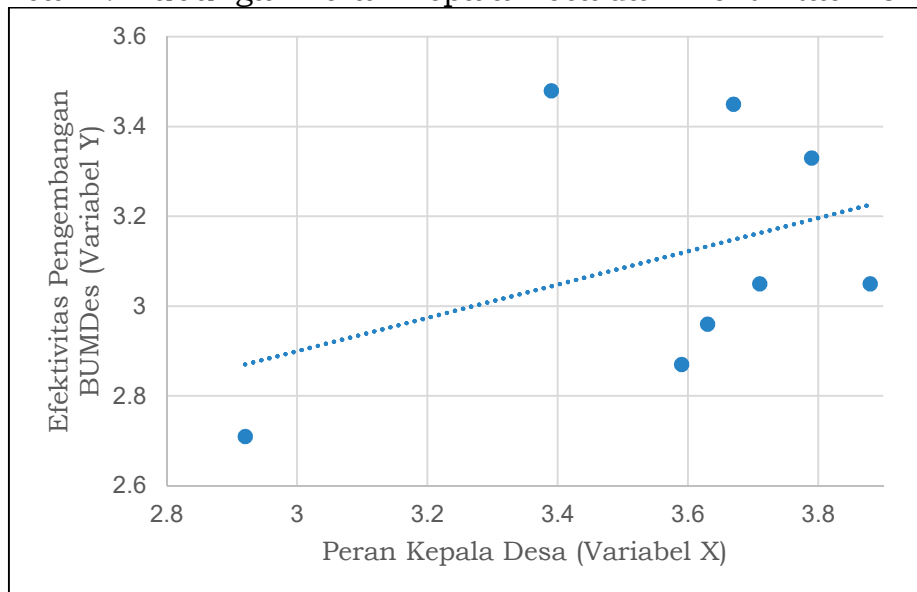
kepemimpinan, sistem manajemen, kemampuan inovasi, serta penerimaan dari masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes masih menghadapi tantangan besar dalam hal daya saing usaha, keterbukaan informasi, dan keberlanjutan finansial. Peran kepala desa yang kuat harus ditopang dengan kepengurusan yang profesional dan masyarakat yang terlibat aktif.

Analisis regresi juga mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara kekuatan kepemimpinan dan pencapaian organisasi. Artinya, meskipun kepala desa memiliki peran besar dalam memulai dan mendukung BUMDes, hal tersebut tidak serta-merta menjamin keberhasilan bila tidak diikuti dengan kapasitas implementasi yang kuat dari unit pelaksana BUMDes itu sendiri.

Secara statistik, nilai R sebesar 0,554 menunjukkan hubungan korelasi yang sedang antara kedua variabel. Ini artinya hubungan tersebut cukup kuat untuk dijadikan acuan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan desa akan berdampak pada efektivitas BUMDes, namun peran kepala desa tidak bekerja dalam ruang hampa dan tetap memerlukan dukungan sistem dan partisipasi kolektif di tingkat desa.

Gambar 1. Hubungan Peran Kepala Desa dan Efektivitas BUMDes



Sumber: Olahan Peneliti 2025

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran kepala desa dalam konteks yang lebih operasional, bukan

hanya administratif atau kebijakan. Kepala desa perlu membangun sistem pemantauan kinerja, memperluas jaringan kerja sama, mendorong pelatihan bagi pengurus, serta menciptakan mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat luas. Semua ini diperlukan agar BUMDes tidak hanya aktif secara struktur, tetapi juga produktif dan berkelanjutan dalam fungsinya sebagai penggerak ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh peran Kepala Desa terhadap efektivitas pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pangauban, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengembangan BUMDes. Kepala Desa telah menjalankan perannya dengan cukup baik, khususnya dalam aspek perencanaan, pembinaan kelembagaan, pengambilan kebijakan, dan fasilitasi anggaran, meskipun keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Efektivitas BUMDes sendiri berada pada kategori cukup, di mana keberhasilan pada aspek inovasi dan kepuasan masyarakat belum sepenuhnya diimbangi oleh produktivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli desa, yang masih rendah akibat kegagalan unit usaha sebelumnya. Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan BUMDes sangat bergantung pada optimalisasi peran Kepala Desa yang tidak hanya berhenti pada aspek perencanaan dan kebijakan, tetapi juga pada keterlibatan aktif dalam pelaksanaan, serta adanya sinergi yang kuat dengan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat desa. Dalam konteks ini, Kepala Desa perlu memperkuat sistem koordinasi dan monitoring, agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih terarah dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Di samping itu, keberhasilan BUMDes juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat pengurus, serta pengembangan model usaha yang adaptif dan berbasis potensi lokal. Dengan kata lain, efektivitas pengembangan BUMDes bukan hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari integrasi kepemimpinan yang kuat, sistem manajemen yang baik, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Kepala Desa sebagai figur sentral dalam struktur pemerintahan desa memiliki posisi strategis untuk menjembatani semua elemen tersebut agar dapat bergerak selaras. Ketika peran ini dijalankan secara menyeluruh dan berkesinambungan, maka BUMDes tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E. D., & Anggarista, E. T. S. (2023). Pengembangan badan usaha milik desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 82–92.
- Doda, M. D., Indrihastuti, P., & Mukoffi, A. (2025). Pengaruh dana desa dan pengembangan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa Landungsari. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 8(1), 45–55.
- Duli, N. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif: Beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi dan analisis data dengan SPSS*. Deepublish.
- Fasfahis, I., Abdurahman, A., & Surahman, F. (2025). Peran kepala desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Bajang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6(1), 20–25.
- Hutagalung, L., & Silalahi, E. (2020). Analisis pengembangan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 33–41.
- Ibrahim, A., Canon, S., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh alokasi dana desa dan pengembangan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193–201.
- Maq, M. M., Dewi, S. P., Muktar, M., Suningrat, N., & Sitopu, J. W. (2024). Pendampingan balai desa dalam mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(5), 185–191.
- Nuryanti, I. (2019). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes): Kasus di BUMDes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(2), 348–359.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2021). Peranan KADes dalam meningkatkan kinerja BUMDes: Survey pada BUMDes Amanah Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 4(1). <https://haluan.riau.co>

- Sudaryana, B., & Agusiady, R. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Deepublish.
- Syafitriyani, I., & Rafika, L. (2023). Peran kepala desa dalam pengembangan BUMDes Makmur Jaya Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. *Jurnal Public Corner FISIP Universitas Wiraraja*, 18(2), 180–195.
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi pengembangan BUMDes dalam optimalisasi potensi ekonomi desa dengan pendekatan social entrepreneur di Kabupaten Kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1).
- Zandri, L. P., Putri, N. D. N., & Fahmi, R. A. (2018). Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dharma Utama. *Working Paper Keuangan Publik Islam*, 9(1).